

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa pandemi covid-19 dan menyangdingkan dengan realitas yang ada di lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yang ditinjau pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada tahap perencanaan yaitu tidak terdapat SOP yang spesifik dalam perencanaan penyusunan laporan keuangan pada saat Covid-19 melainkan hanya terdapat SOP Standar Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian. SOP Penyusunan Laporan Keuangan di masa pandemi kurang lebih sama dengan di masa non pandemi. Perbedaannya hanya terdapat pada pelaksanaan rekonsiliasi untuk pemutakhiran data BMN serta pembahasan perencanaan dan perbaikan data laporan keuangan yang dilakukan secara virtual. Mengenai pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh pegawai dalam perencanaan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yaitu dikarenakan penyusunan laporan keuangan adalah kegiatan rutin Tusi maka perencanaan penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan walaupun tanpa adanya Standar Operasional Prosedur. Dalam hal sarana dan prasarana masih belum memadai karena banyak terdapat laptop yang sudah usang. Kendala selanjutnya yang dihadapi dalam perencanaan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut : (1) Diberlakukannya PPKM sehingga menghambat pelaksanaan rapat

- perencanaan penyusunan laporan keuangan secara tatap muka langsung, (2) Penyusunan surat dan pedoman penyusunan laporan keuangan, terutama dalam hal verifikasi secara berjenjang dan penandatungannya terkendala karena adanya penerapan sistem WFH, dan (3) Perlu diperhatikan perubahan kebijakan eksternal penyusunan laporan keuangan dari Kemenkeu. Pihak yang bertanggungjawab apabila terdapat kendala dalam perencanaan penyusunan laporan keuangan pada saat Covid-19 yaitu pada masing-masing unit penyusun laporan keuangan dan penyelesaian kendala dilakukan melalui konsultasi dengan masing-masing unit pembinanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- b. Pada tahap pengorganisasian yaitu tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik dalam pengorganisasian penyusunan laporan keuangan pada saat Covid-19. SOP pengorganisasian laporan keuangan pada masa pandemi Covid-19 kurang lebih sama dengan masa non pandemi, perbedaannya hanya terdapat pada pengorganisasian yang dilakukan secara virtual. SOP yang digunakan dalam pengorganisasian penyusunan laporan keuangan pada saat Covid-19 yaitu hanya SOP Standar Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian. Kendala yang dihadapi dalam pengorganisasian penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yaitu karena sudah menjadi Tusi rutin maka tetap perlu beradaptasi dengan perubahan kebijakan eksternal penyusunan laporan keuangan dari Kemenkeu. Selain itu, diberlakukannya PPKM menghambat pelaksanaan rapat pengorganisasian penyusunan laporan keuangan secara tatap muka langsung. Pihak yang bertanggungjawab apabila terdapat kendala dalam pengorganisasian penyusunan laporan keuangan pada saat Covid-19 adalah pada masing-masing pegawai dan penyelesaian kendala dilakukan melalui konsultasi dengan atasan terkait.
- c. Pada tahap pelaksanaan yaitu tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan

pada Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 melainkan hanya menggunakan SOP standar yaitu yang pertama adalah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian dan yang kedua adalah Penggabungan Laporan Keuangan. SOP penyusunan laporan keuangan di masa pandemi kurang lebih sama dengan di masa non pandemi, perbedaannya hanya terdapat pada pelaksanaan rekonsiliasi untuk pemutakhiran data BMN dan perbaikan data laporan keuangan yang dilakukan secara virtual. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan waktu dari Kemenkeu dan beban kerja personil. Selain itu terdapat beberapa kendala lain yaitu pertama, diberlakukannya PPKM pada akhirnya menghambat pelaksanaan kegiatan pendampingan pra rekonsiliasi data tingkat satuan kerja, rekonsiliasi data tingkat kantor wilayah, dan rekonsiliasi data tingkat unit Eselon I, dan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian secara tatap muka langsung. Kedua, pada masa awal PPKM, sebagian pegawai mengalami kendala dan kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk bekerja dengan mekanisme Work From Home. Ketiga, pemahaman operator mengenai penggunaan akun khusus pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh pegawai sehingga masih terdapat kesalahan penggunaan akun belanja. Penyebab kurang optimalnya penyusunan laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19 yaitu yang pertama adalah keterbatasan waktu dan beban kerja personil dan yang kedua adalah penyesuaian terhadap kebijakan eksternal penyusunan LK dari Kemenkeu. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pra rekonsiliasi data, rekonsiliasi data, dan penyusunan laporan keuangan menjadi tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka dan hal ini menjadi kendala yang cukup serius di awal masa pandemi sehingga proses penyusunan laporan keuangan dinilai menjadi kurang optimal. Penyebab kurang optimalnya pengendalian intern atas pelaporan keuangan dalam

penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19 yaitu yang pertama adalah PIPK membutuhkan waktu berbulan-bulan dalam proses penerapan dan penilaiannya karena dilaksanakan di seluruh entitas akuntansi atau seluruh satker dan terdapat fungsi konsolidasi yang harus dilakukan oleh Kanwil, Eselon I, dan Kementerian dan yang kedua adalah pergantian personil yang tidak disertai transfer knowledge yang memadai. Sistem kerja Work From Home menyebabkan proses pengendalian intern atas pelaporan keuangan menjadi terkendala baik dalam pelaksanaannya maupun pendokumentasiannya. Penyebab kurang optimalnya sumber daya manusia/penyusun laporan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19 yang pertama adalah adaptasi dengan cara kerja WFH termasuk penggunaan teknologi dan yang kedua adalah transfer knowledge. Karena kegiatan pra rekonsiliasi data, rekonsiliasi data, dan penyusunan laporan keuangan tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka maka arahan dan konsultasi yang diberikan oleh pembina kepada para operator dan penyusun laporan keuangan tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegawai penyusun laporan keuangan menjadi kurang berkembang. Penyebab kurang optimalnya sistem informasi sebagai sarana pendukung dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19 yaitu aplikasi penyusunan LK terkadang tidak dapat mengikuti perubahan kebijakan eksternal dari Kemenkeu. PPKM dan sistem kerja WFH menyebabkan proses penggunaan sistem informasi di kantor menjadi kurang optimal. Penyebab kurang optimalnya penyajian pengungkapan yang memadai terhadap transaksi belanja selama pandemi Covid-19 dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19 yaitu pertama adalah keterbatasan waktu dan yang kedua adalah keterbatasan dan bervariasinya pemahaman terhadap business process penyusunan laporan keuangan, khususnya akun-akun baru terkait PC-PEN. Munculnya akun-

akun belanja khusus penanganan pandemi Covid-19 di awal masa-masa pandemi menyebabkan munculnya banyak permasalahan data laporan keuangan, khususnya terkait dengan kesalahan penggunaan akun belanja. Pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pada Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 adalah pada masing-masing pegawai dan penyelesaian kendala dilakukan melalui konsultasi dengan atasan terkait. Pihak yang bertanggungjawab saat terdapat kendala yaitu Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Satker Setjen, Eselon I Setjen, dan Kementerian

- d. Pada tahap pengawasan yaitu tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan pada Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 melainkan hanya menggunakan SOP standar yaitu yang pertama adalah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian dan yang kedua adalah Penggabungan Laporan Keuangan. SOP penyusunan laporan keuangan di masa pandemi yang kurang lebih sama dengan di masa non pandemi, perbedaannya hanya terdapat pada pelaksanaan rekonsiliasi untuk pemutakhiran data BMN dan perbaikan data laporan keuangan yang dilakukan secara virtual. Kendala dalam hal sarana dan prasarana yang belum memadai yaitu terdapat beberapa laptop yang sudah usang dan terdapat beberapa satuan kerja yang koneksi internetnya lemah sehingga memperlambat proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yaitu belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat penyusun laporan keuangan atas kinerja pegawai penyusun laporan keuangan dan proses penandatanganan surat dan dokumen pendukung penyusunan laporan keuangan cukup terkendala karena adanya sistem Work From Home akibat dari diterapkannya PPKM. Hal-hal lain yang menjadi penyebab belum

optimalnya pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan waktu dari Kemenkeu dan penyesuaian terhadap kebijakan eksternal penyusunan laporan keuangan dari Kemenkeu. Penyebab lainnya yaitu kurangnya pengetahuan para penyusun laporan keuangan mengenai hal-hal signifikan yang perlu lebih banyak diperhatikan. Penyusunan laporan keuangan khususnya terkait dengan kesesuaian penggunaan akun belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 berpotensi menjadi temuan pemeriksaan BPK RI. Pihak yang bertanggungjawab apabila terdapat kendala dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan pada Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 adalah pada masing-masing pegawai dan penyelesaian kendala dilakukan melalui konsultasi dengan atasan terkait. Pihak yang bertanggungjawab saat terdapat kendala yaitu Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, dan Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Satker Setjen, Eselon I Setjen, dan Kementerian.

2. Solusi terkait penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19 yang ditinjau pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada tahap perencanaan, solusi yang dilakukan oleh masing-masing unit penyusun laporan keuangan dengan melalui konsultasi dengan masing-masing unit pembinanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yaitu dengan melaksanakan rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, dengan melakukan komunikasi melalui Whatsapp dan e-mail. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan kebijakan eksternal penyusunan laporan keuangan dari Kemenkeu
 - b. Pada tahap pengorganisasian, solusi yang dilakukan masing-masing pegawai melalui konsultasi dengan atasan terkait yaitu dengan melaksanakan rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting untuk mengorganisasikan dan membagi tugas pegawai dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah

perubahan kebijakan eksternal penyusunan laporan keuangan dari Kemenkeu

- c. Pada tahap pelaksanaan, solusi yang dilakukan oleh masing-masing pegawai dengan melalui konsultasi dengan atasan terkait seperti Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Satker Setjen, Eselon I Setjen, dan Kementerian yaitu dengan melakukan lembur atau karantina penyusunan laporan keuangan; menyelenggarakan kegiatan pra rekonsiliasi data, rekonsiliasi data, dan penyusunan laporan keuangan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting; Membuat SOP Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK agar bisa dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya dievaluasi secara rutin sehingga terdapat perbaikan secara bertahap; senantiasa melakukan koordinasi secara intensif melalui media komunikasi seperti telepon, Whatsapp, dan Zoom Meeting; mengadakan peer discussion; melaksanakan kegiatan monev dan pembinaan secara virtual serta melakukan komunikasi berjenjang secara intensif melalui media komunikasi seperti telepon dan Whatsapp; melakukan konsultasi dengan Kemenkeu; memberdayakan sistem kerja dan koordinasi secara jarak jauh dengan tetap memberdayakan sistem informasi dan aplikasi yang tersedia seperti SAIBA dan e-Rekon dan LK; melakukan konsultasi dengan Kemenkeu, sosialisasi, monev, dan pembinaan penyusunan laporan keuangan secara daring dan luring; dan melakukan kegiatan pendampingan, monev, dan pembinaan
- d. Pada tahap pengawasan, solusi yang dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, dan Koordinator Penyusunan Laporan Keuangan Satker Setjen, Eselon I Setjen, dan Kementerian adalah memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin; menyusun pedoman, memberikan konsultasi, melakukan monev, dan memberikan pembinaan kepada para penyusun laporan keuangan di berbagai jenjang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Peneliti dapat memberikan saran-saran yang bertujuan untuk lebih meningkatkan optimalisasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa pandemi Covid-19, seluruh saran yang Peneliti sampaikan di bawah ini masih dapat digunakan pada situasi setelah pandemi Covid-19 karena pada dasarnya perbaikan manajemen dalam bekerja dan penggunaan teknologi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penyusunan laporan keuangan terutama pada kondisi-kondisi yang tidak dapat diprediksi. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para penyusun laporan keuangan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun laporan keuangan di Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa saran yang Peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyebab belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19, para penyusun laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM perlu membuat Standar Operasional Prosedur yang spesifik dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyusunan laporan keuangan pada saat Covid-19 mengingat saat pandemi memiliki kondisi yang berbeda dengan saat non pandemi dimana mayoritas kegiatan dilaksanakan secara virtual menggunakan media online seperti Zoom Meeting dan Whatsapp dan melakukan pembatasan terhadap pertemuan tatap muka secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan penganggaran untuk pembelian laptop karena banyak laptop yang sudah usang menghambat pekerjaan para pegawai sehingga kinerjanya kurang optimal terutama pada saat dan setelah pandemi Covid-19 saat ini mayoritas kegiatan yang dilaksanakan harus selalu menggunakan laptop untuk membuat laporan keuangan maupun untuk melakukan pertemuan daring. Kemudian, perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut mengenai bisnis proses dan Kebijakan Akuntansi terkait penggunaan akun khusus pandemi Covid-19 juga akun akun

spesifik lainnya dimasa akan datang agar dalam penyusunan laporan keuangan pemahaman operator lebih optimal dan tidak terjadi kesalahan penggunaan akun belanja dalam penyusunan laporan keuangan baik di masa Pandemi maupun di masa tidak pandemi Covid- 19;

2. Dalam solusi terkait penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa dan setelah pandemi Covid-19, para penyusun laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM perlu memperhatikan dan menerapkan setiap kebijakan Internal dari Kementerian Hukum dan HAM maupun eksternal dari Kementerian Keuangan juga selalu berkoordinasi dengan Entitas Akuntansi maupun Entitas pelaporan secara berjenjang ;
3. Peneliti merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Keuangan meningkatkan manajemen risiko dengan cara memperkuat kompetensi para pegawai/ Penyusun Laporan Keuangan dengan membuat SOP Penerapan, penilaian maupun workshop terkait Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan memberikan berbagai pembinaan melalui Pelatihan penyusunan laporan keuangan serta Melakukan konsolidasi dengan seluruh Entitas Akuntansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun dan memperbaharui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual kemenkumham agar Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan penyusunan laporan keuangan dengan seoptimal mungkin;
4. Bagi peneliti berikutnya disarankan sebagai berikut : (a) Indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkonsentrasi pada teori manajemen menurut Terry dengan empat fokus penelitian yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk optimalisasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa masa dan setelah pandemi Covid-19. Bagi penelitian mendatang disarankan untuk dapat menggunakan indikator penelitian lain agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna, misalnya menggunakan teori manajemen menurut Gullick dengan delapan fokus penelitian yaitu : perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan pegawai, pengarahan, koordinasi, pelaporan, pembuatan anggaran, dan pengawasan, (b) Lokasi penelitian pada penelitian ini dibatasi untuk satu kementerian saja yaitu Kementerian Hukum dan HAM sehingga penelitian mendatang disarankan dapat menggunakan lokasi penelitian lebih besar dan luas misalnya meneliti seluruh Kementerian di Indonesia agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, dan lebih bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang optimalisasi penyusunan laporan keuangan Kementerian di masa dan setelah pandemi Covid-19, dan (c) Waktu untuk pengamatan dan penyebaran kuesioner disarankan untuk dilakukan lebih lama yaitu selama 1-2 bulan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, bagi masyarakat disarankan untuk lebih menambah wawasan pengetahuan dengan membaca beberapa referensi lain berupa artikel ilmiah terkait dengan optimalisasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa pandemi Covid-19.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

1. McKibbin, W. and Fernando, R. (2020), The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios (No. 2020-19), Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University;
2. Resesi (Kementerian Keuangan. (2020). APBN Kita, Kinerja dan Fakta, April 2020: Menjaga dan Mengelola #Uangkita ditengah tekanan pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan.);
3. Government Financial Reporting in Times of the COVID-19 Pandemic. Government Policy Note. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO;
4. CFP, (2020). https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes_ficheiros/sumario-executivo-08-20201.pdf;
5. Initial budget and public management responses to the coronavirus (Covid-19) pandemic in OECD countries. <http://www.oecd.org/gov/budgeting/initial-budget-andpublic-management-responses-to-covid19-in-oecdcountries.pdf>
6. Cohen, S., Rossi, F., Caperchione, E., & Brusca, I. (2020). (2021) Debate: If not now, then when? Covid-19 as an accelerator for public sector accrual accounting in Europe. *Public Money & Management*, 41(1), 10–12. DOI: 10.1080/09540962.2021.1834714
7. Patrícia Gomes (2021): Financial and non-financial responses to the Covid-19 pandemic: insights from Portugal and lessons for future, *Public Money & Management*, DOI:10.1080/09540962.2021.1880059
8. Raimi Adekunle Anisere-Hameed (2021), Effects Of Covid-19 Pandemic On Accounting And Financial Reporting In Nigeria
9. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited)

10. Profil Kualitas E-Rekon LK Kementerian Keuangan. <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/home>
11. Kementerian Keuangan (2021), Internalisasi PIPK Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
12. Kedepankan Pelayanan Publik Digital pada saat Pandemi. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kedepankan-pelayanan-publik-digital-dalam-masa-pandemi>
13. Pandemi COVID-19 dan Transformasi Digital, <https://cloudex.wg.ugm.ac.id/2020/07/01/pandemi-covid-19-dan-transformasi-digital/>
14. Pahami Manfaat Transformasi Digital di Tengah Pandemi, <https://integrasolusi.com/blog/pahami-manfaat-transformasi-digital-di-tengah-pandemi/>
15. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
16. Atalia Dezy Amalla dan Andy Dwi Bayu Bawono (2021). Peran Akuntansi Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Akuntansi* Vol. 6, No. 1 (Juni 2021) 88-102 ISSN 2579-7611 (Online) | <http://u.lipi.go.id/1487661056>
17. Zakariya Rizki (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. II, No.1, (2020), Hal.112-123
18. Ariadi Wa dan Jatmika Windi (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi papua dimasa pandemi Covid- 19. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura* p-ISSN : 2086-4515 | e-ISSN : 2746-1483 Volume 12, Nomor 1, Juli 2021 ejournal.stie-portnumbay.ac.id
19. Sultana Reajmin (2021). Impact of COVID-19 pandemic on financial reporting and disclosure practices: empirical evidence from Bangladesh

- Asian Journal of Economics and Banking Vol. 6 No. 1, 2022 pp. 122-139
Emerald Publishing Limited e-ISSN: 2633-7991 p-ISSN: 2615-9821 DOI
10.1108/AJEB-09-2021-0110
20. Zyznarska-Dworczak, B. (2018), "Legitimacy theory in management accounting research", *Problemy Zarządzania*, Vol. 16 No. 172, pp. 195-203.
 21. Suchman, M. (1995), "Managing legitimacy: strategic and intuitional approaches", *Academy of Management Review*, Vol. 20 No. 3, pp. 571-610.
 22. Adekunle Raimi, Hameed Anisere (2021). Effects Of Covid-19 Pandemic On Accounting And Financial Reporting In Nigeria *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research* Vol.9, No. 6, pp.50-63, 2021 <https://doi.org/10.37745/ejaaf.2021>
 23. Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*, 1st ed., New York: Wiley
 24. Theophilus, A. A., Ademola, A. & Otolaiye, E. D. (2020). Covid-19 and accounting education in Sub-sahara Africa. *European Journal of Business, Economics and Accountancy*, 8(3), 1 – 13
 25. Tarigan, Desta. (2019) *optimalisasi penyelesaian piutang negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tesis. STIA LAN Jakarta
 26. Winardi, (1999). *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung : Mandar Maju, Hal 363
 27. George R Terry (2020). *Prinsip prinsip manajemen*. Bumi aksara
 28. George, R. Terry, dan Leslie W Rul. 1999. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
 29. Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. p.4
 30. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat:eksploratif, enterpretif, interaktifdan konstruktif)*. CV Alfabeta, Bandung. p.13

31. Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. p.19
32. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat:eksploratif, enterpretif, interaktifdan konstruktif)*. CV Alfabeta, Bandung.p.104
33. Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. p.254
34. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (CV Alfabeta, Bandung.p.1227
35. Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Raja Grafindo Persada,Jakarta
36. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat:eksploratif, enterpretif, interaktifdan konstruktif)*. CV Alfabeta, Bandung.p.101
37. Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis KeArah Varian Kontemporer)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
38. George R Terry (2020). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara, Hal 10
39. Luther Gullick. 1937. *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration, Hal. 195
40. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
41. Hoesada Jan, Dr (2020). *Teori Keagenan*. <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2020/09/MAJALAH-MAYA-KSAP-1-OKTOBER-2020.pdf>
42. George R. Terry, dan Leslie W Rul. 1999. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 7
43. Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF, Hal 276

44. Poerwadarminta WJS. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 753



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Peneliti : Yudhi Arviansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 September 1979
Alamat Rumah : Perum Wahana Pondok Gede Blok M5
No.17
Kec. Jatisari Jawa Barat 17426
Nomor Telepon : 08561393139
Email : yudhirtiga@gmail.com
Status Perkawinan : Kawin
Nama Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI
Alamat Instansi : Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 5-6,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 5253004
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
Pangkat /Golongan : Penata / IIIc
Riwayat Pendidikan : S1 – Teknik Industri, Universitas Persada
Indonesia YAI
Riwayat Pekerjaan : Biro Umum Sekretariat Jenderal (2005-2012)
- Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (2012-
Saat ini)



LAMPIRAN- LAMPIRAN

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Lampiran I

**PEDOMAN WAWANCARA
INFORMED CONSENT PENELITIAN**

**Kepada Yth
Bapak/Ibu Informan**

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama dengan ini, saya:

Nama : Yudhi Arviansyah

NPM : 1863002142

Adalah mahasiswa Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **“Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Dan HAM di Masa Pandemi Covid 19”**. Atas hal tersebut, saya bermaksud untuk meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat dilakukan wawancara untuk melengkapi penelitian ini.

Waktu yang dibutuhkan dalam wawancara berkisar pada 30-45 menit, sementara metode yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Peneliti juga dapat menambahkan beberapa

pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat pada pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian.

Pelaksanaan wawancara direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara. Mohon izin menyampaikan bahwa wawancara pada setiap informan berbeda-beda, ada yang satu kali wawancara dan ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti.

Segala informasi yang diperoleh dalam proses wawancara ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademis dan saya akan menjamin kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian yang berlaku. Jawaban Bapak/Ibu akan menjadi masukan yang sangat penting bagi penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu dan memberi informasi terkait penelitian ini, saya sebagai Peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar- besarnya, semoga Allah SWT Tuhan YMK senantiasa memberikan Bapak/Ibu kesehatan, kekuatan dan karunia.

Hormat Saya

Yudhi Arviansyah
NPM. 1863002142

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/ Tanggal	:	
Waktu	:	
Lokasi	:	

No	Initial	Transkrip
1	:	Bagaimana Standar Operasional prosedur dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada Kemenkumham dari aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Kemenkumham di masa pandemi Covid-19
2	:	Apa saja tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19
3	:	Bagaimana tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang di Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
4	:	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
5	:	Apa saja dokumen yang dibutuhkan dan dokumen yang dihasilkan dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
6	:	Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

		penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19? Dan apakah sudah memadai?
7		: Sistem informasi apa yang digunakan dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19? Bagaimana cara kerja sistem informasi tersebut? Dan apa saja yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut
8		: Berapa jumlah pegawai yang terlibat dalam membuat Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19? Siapa saja pegawai beserta jabatannya yang terlibat?
9		: Bagaimana struktur organisasi dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
10		: Apa saja tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pegawai yang terlibat dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
11		: Bagaimana sistem pembagian tugas kepada masing-masing pegawai dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
12		Bagaimana koordinasi yang dilakukan di setiap unit yang terlibat dalam lingkup internal dan eksternal dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengarahan dan Pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
13		Bagaimana cara melakukan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi

		Covid-19? Dan siapa saja yang bertanggungjawab apabila terdapat kendala?
14		Apakah seluruh pegawai memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
15		Berapa banyak anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
16		Apa saja faktor pendukung dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19? Dan bagaimana cara mengukur keberhasilan atau penilaiannya?
17		Apa saja kendala yang dihadapi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19? Dan bagaimana upaya yang dilakukan?
18		Apakah terdapat pengarahan dari atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
19		Bagaimana langkah-langkah pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19? Siapa saja yang bertanggungjawab apabila terdapat kendala?
20		Bagaimana pedoman kerja yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
21		Bagaimana peninjauan secara terjadwal untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan dan pengawasan

		penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
22		Apa yang menyebabkan kurang optimalnya penyusunan laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?
23		Apa yang menyebabkan kurang optimalnya pengendalian intern atas pelaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?
24		Apa yang menyebabkan kurang optimalnya sumber daya manusia/penyusun laporan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?
25		Apa yang menyebabkan kurang optimalnya sistem informasi sebagai sarana pendukung dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?
26		Apa yang menyebabkan kurang optimalnya penyajian pengungkapan yang memadai terhadap transaksi belanja selama pandemi Covid-19 dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?
27		Rasio keuangan apa saja yang biasanya paling sering dilihat untuk mengetahui performa keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
28		Bagaimana kontrol keuangan yang digunakan untuk melihat kinerja Kemenkumham dalam penyusunan laporan keuangan di masa pandemi Covid-19?

29		Bagaimana cara melakukan perbandingan antara hasil upaya menyusun laporan keuangan yang telah dilakukan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa pandemi Covid-19?
30		Apa saja hal-hal yang menjadi penyebab belum optimalnya pengawasan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham di masa Pandemi Covid-19? Dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti : Yudhi Arviansyah
**Lokasi penelitian : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM**

Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pelaporan keuangan pada level kementerian pada Biro Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM

Aspek yang diamati:

1. Mengamati rutinitas kegiatan pelaksanaan pelaporan keuangan
2. Mengamati sarana dan prasarana pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Mengamati SDM pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Mengamati aplikasi serta penginputan dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Peneliti

Yudhi Arviansyah

NPM. 1863002142

Lampiran III

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

Peneliti : Yudhi Arviansyah
**Lokasi penelitian : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM**

Untuk mendukung validitas data yang lebih akurat, peneliti juga menggunakan pedoman dokumentasi dalam melakukan telaah dokumen untuk melengkapi wawancara maupun observasi. Adapun dokumen yang ditelaah sebagai berikut:

1. Regulasi berupa peraturan perundang-undangan beserta turunannya sebagai dasar dalam pelaksanaan pelaporan keuangan.
2. Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Hukum dan HAM hingga Standar Operasional Prosedur pada Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.
5. Laporan BMN Kementerian Hukum dan HAM.
6. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kemenkumham;
7. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

Peneliti

Yudhi Arviansyah
NPM. 1863002142

Lampiran IV

Peneliti melakukan observasi partisipatif terkait proses penyusunan laporan keuangan pada Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tanggal 24-29 Januari 2022



Peneliti melakukan observasi partisipatif terkait proses penyusunan laporan keuangan pada Tingkat Kantor Wilayah .

Pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

